

INDEKS GINI

KOTA MOJOKERTO

Tahun 2019



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MOJOKERTO
BEKERJASAMA DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

100%

Cumulative share of people from lowest to highest incomes



SAMBUTAN WALIKOTA MOJOKERTO

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Mojokerto “Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat”, maka semua program pembangunan harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kota Mojokerto secara merata, walaupun pada kenyataannya masih ditemui ketimpangan tingkat sosial ekonomi di masyarakat.

Publikasi **Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2019** ini berguna untuk mendapatkan gambaran mengenai ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dengan menggunakan alat ukur indeks gini dan ketimpangan relatif.

Hasil publikasi ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan, melakukan pemantauan, dan mengevaluasi program pembangunan agar tepat sasaran.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya publikasi Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2019.

Mojokerto, Agustus 2019
WALIKOTA MOJOKERTO

TTD

IKA PUSPITASARI, SE.



KATA PENGANTAR

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat. Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Indeks Gini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dan distribusi pendapatan penduduk.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Publikasi **Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2019**, diucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dan memberi saran demi sempurnanya publikasi ini di masa mendatang.

Dengan memanjatkan syukur kepada Allah SWT saya menyambut baik penerbitan publikasi ini untuk perencanaan pembangunan Kota Mojokerto, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi serupa.

Mojokerto, Agustus 2019
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Mojokerto

TTD

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., MM.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA MOJOKERTO	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sasaran	7
1.5 Ruang Lingkup	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9
2.2 Konsumsi Rumah Tangga	11
2.3 Distribusi Pendapatan	13
2.4 Ketimpangan Pendapatan dan Pembangunan	14
2.5 Teknik Perhitungan Ketimpangan	19
2.6 Kategori Ketimpangan	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Objek Penelitian	23
3.2 Konsep dan Definisi	23
3.3 Jenis Penelitian	24
3.4 Metode Pengumpulan Data	25
3.5 Populasi dan Sampling	26
3.5.1. Populasi	26
3.5.2. Teknik Sampling	26
3.6 Kerangka Pemikiran	27



3.7	Metode Analisis Data	27
3.7.1.	Metode Pengeluaran	27
3.7.2.	Metode Perhitungan Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>)	29
3.7.3.	Kurva Lorens	30
3.7.4.	Kriteria Bank Dunia	31
BAB IV GAMBARAN UMUM		32
4.1.	Letak Geografis	32
4.2.	Kependudukan	33
4.3.	Pendidikan	36
4.4.	Kesehatan	39
4.5.	Perumahan	42
4.6.	Perekonomian	46
BAB V PEMBAHASAN		51
5.1.	Pengeluaran Rumah Tangga Kota Mojokerto	51
5.2.	Indeks Gini Kota Mojokerto	54
5.3.	Kurva Lorens Kota Mojokerto	55
5.4.	Ketimpangan Pendapatan Versi Bank Dunia	56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		58
6.1.	Kesimpulan	58
6.2.	Saran	58



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur	34
Tabel 4.2	Proporsi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin	35
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi, 2018	37
Tabel 4.4	PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Pertumbuhannya Menurut Lapangan Usaha	46
Tabel 4.5	PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Pertumbuhannya Menurut Lapangan Usaha	48
Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Mojokerto Menurut Kelompok Pengeluaran (rupiah) tahun 2015-2018	52
Tabel 5.2.	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Mojokerto Menurut Kelompok Makanan (rupiah) tahun 2015-2018	52
Tabel 5.3.	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Mojokerto Menurut Kelompok non makanan (rupiah) tahun 2015-2018	53
Tabel 5.4.	Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2015-2018	54
Tabel 5.5.	Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2018 menurut Kecamatan	54
Tabel 5.6.	Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2015-2018 Menurut Kelompok Penduduk	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kurva Lorens	30
Gambar 4.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto	32
Gambar 4.2	Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin	34
Gambar 4.3	Persentase Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	34
Gambar 4.4	Persentase Penduduk Kota Mojokerto Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca	36
Gambar 4.5	Persentase Penduduk Kota Mojokerto Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi	37
Gambar 4.6	Angka Partisipasi Sekolah Kota Mojokerto	39
Gambar 4.7	Persentase Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Keluhan Kesehatan, 2018	40
Gambar 4.8	Persentase Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Tempat Berobat Jalan, 2018	40
Gambar 4.9	Proporsi Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki	41
Gambar 4.10	Proporsi Penduduk Kota Mojokerto yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Rawat Inap	42
Gambar 4.11	Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Berdasarkan Status Rumah yang Ditempati	43
Gambar 4.12	Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Berdasarkan Penggunaan Fasilitas BAB (a) dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2018 (b)	43
Gambar 4.13	Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Berdasarkan Sumber Air Minum	44
Gambar 4.14	Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Berdasarkan Sumber Air Mandi	45
Gambar 4.15	Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Berdasarkan Bahan Bakar Utama untuk Memasak	45
Gambar 4.16	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto menurut Lapangan Usaha Tahun 2018	48



Gambar 4.17	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto menurut Pengeluaran Tahun 2017	49
Gambar 5.1	Peta Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2018	55
Gambar 5.2	Kurva Lorens Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2018	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kondisi dewasa ini, pemerataan pembangunan serta evaluasi hasil-hasil menjadi pembahasan penting di semua wilayah Indonesia. Hal tersebut bukan saja menjadi pembahasan nasional, melainkan juga pembahasan secara internasional karena selama ini indikator-indikator perekonomian suatu negara adalah pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pemerataan pembangunan dapat dilihat juga dari pencapaian hasil-hasil pembangunan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberi alternatif bagi setiap daerah untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan pembangunan, terutama perubahan kebijakan pembangunan ekonomi. Dengan perubahan kebijakan serta bertambahnya pilihan kebijakan diharapkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah bukan hanya mampu terlihat dari indikator-indikator makro perekonomian, namun dapat bersifat berkelanjutan.

Gagasan-gagasan dan inisiatif-inisiatif sebagai proses yang menyeluruh dalam rangka mempercepat perubahan kerangka kerja dan penguatan instrumen kebijakan-kebijakan pembangunan dibutuhkan untuk merancang kebijakan ekonomi suatu negara atau daerah. Gagasan dan inisiatif ini seharusnya muncul dalam tahap perencanaan kebijakan ekonomi. Adapun hasil evaluasi kinerja pembangunan tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap perubahan cara pandang bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan tujuan akhir, melainkan merupakan suatu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perubahan kebijakan ekonomi diharapkan mampu mengusulkan perubahan paradigma yang lebih ditujukan pada hal-hal yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan dalam rangka melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat

dinikmati oleh semua kalangan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perekonomian.

Dengan demikian, pembangunan manusia lebih difokuskan untuk memperluas adanya pilihan dan aspirasi masyarakat yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pemberdayaan. Hal tersebut dapat dicapai antara lain melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia. Diantaranya meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan serta kesejahteraan ekonomi agar dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Selain hal tersebut, Kota Mojokerto memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen kuat tersebut terangkum dalam Visi Kota Mojokerto Tahun 2019-2023 yaitu; “Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat” pencapaiannya dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Dalam proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti jika ketimpangan juga terjadi di setiap lini. Pemerataan pendapatan pun akan sia-sia jika perekonomian tidak bergerak sama sekali. Jika demikian, yang muncul justru pemerataan ketidakmakmuran, yang sama halnya dengan tidak ada pembangunan. Para ekonom klasik pernah berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi otomatis akan menciptakan kesejahteraan. Mereka berasumsi, sektor ekonomi yang bergerak dinamis membawa dampak ekonomis bagi entitas di sekitarnya. Ada pula pandangan yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi dengan cakupan luas dapat mendorong kegiatan ekonomi lain yang skalanya lebih kecil untuk bergerak maju. Melalui pendapatnya, para ekonom klasik ini berharap akan terbangun keterkaitan antar sektor ekonomi.

Indonesia pernah mengadopsi teori ini pada saat orde baru. Namun, penguatan industri manufaktur melalui investasi dan perluasan areal industri yang mengokupansi lahan pertanian subur justru membuat jurang ketimpangan makin lebar. Fenomena sederhana yang bisa menjadi indikator adalah terkonsentrasinya pusat perekonomian di wilayah Jawa. Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi bukan satu-satunya tujuan yang harus dicapai. Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Salah satu masalah tingkat kesejahteraan di Kota Mojokerto adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia pada umumnya tidak

saja terjadi di kawasan-kawasan pedesaan atau pertanian (rural), tetapi juga menjadi masalah di perkotaan termasuk di Kota Mojokerto. Masalah-masalah kemiskinan salah satunya disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Meskipun perekonomian Kota Mojokerto merupakan bagian perekonomian yang berkembang, akan tetapi persoalan distribusi pendapatan yang belum merata, dapat menimbulkan masalah yang lebih besar saat ini maupun di kemudian hari. Untuk itu, jika ketimpangan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan semakin memperparah keadaan perekonomian Kota Mojokerto ke depan.

Kajian ini fokus membahas tentang analisis kondisi distribusi pendapatan terhadap perubahan tingkat kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Mojokerto, sebagaimana melihat tingkat distribusi pendapatan di masing-masing Kecamatan di Kota Mojokerto. Pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Mojokerto dalam hal ini merupakan bagian dari proses perbaikan kualitas kesejahteraan ekonomi penduduk. Dimana, hal itu salah satunya dapat dimulai dengan memperbaiki tingkat pemerataan distribusi pendapatan di berbagai golongan ekonomi masyarakat. Pembangunan tingkat kesejahteraan ekonomi di Kota Mojokerto dapat dipandang sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat/warganya.

Pembangunan ekonomi pada satu sisi merupakan suatu proses yang bersifat multidimensional mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi pemerintahan dan masyarakat, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi, pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan. Untuk itu, proses pembangunan ekonomi di Kota Mojokerto tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk

penduduk Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto dalam hal ini Bappeko Kota Mojokerto sejak awal menyadari adanya kondisi eksisting maupun potensi adanya kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat di Kota Mojokerto (maupun daerah lainnya di Jawa Timur), sehingga penting untuk selalu dievaluasi. Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yang pesat saat ini diharapkan dapat membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya, atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto berhubungan positif dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

1.2 Permasalahan

Dalam kurun waktu terakhir, Kota Mojokerto sukses mengemas pertumbuhan ekonomi yang cukup impresif. BPS mencatat, pada 2017 pertumbuhan ekonomi wilayah ini menyentuh angka 5,65 persen dan 5,80 pada tahun 2018. Secara umum dapat dilihat bahwa sebagian wilayah di Kota Mojokerto memiliki potensi ekonomi yang ditopang oleh perdagangan dimana pembangunan ekonominya lebih cepat dibanding wilayah lainnya. Akan tetapi ada juga wilayah yang hanya merupakan wilayah perumahan dengan penduduk relatif mapan. Di sisi lain ada daerah yang secara potensi wilayahnya tinggi karena memiliki potensi Hotel dan Restoran (jasa pariwisata) tetapi bisa jadi perekonomian masyarakatnya relatif rendah.

Dengan dasar pemikiran tersebut maka perlu dilakukan kajian yang dapat melihat tingkat kesenjangan baik dilihat sisi ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antar wilayah. Pertanyaan yang harus dikaji lebih mendalam, apakah keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro di Kota Mojokerto juga menyebabkan kehidupan masyarakatnya lebih

sejahtera? Apakah hasil pembangunan tersebut dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk Kota Mojokerto?

Untuk mengkaji hal tersebut perlu dilakukan sebuah pengukuran dengan melihat indikator-indikator Indeks Gini Ratio Kota Mojokerto yang menggambarkan kondisi secara umum permasalahan distribusi pendapatan. Alat atau indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang umum digunakan adalah Koefisien Gini (Gini Ratio) dengan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia.

Pasca diratifikasinya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014, daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang penuh untuk menentukan arah pembangunannya sendiri. Kurangnya informasi dan bahasan terkait Indeks Gini, tentu mempengaruhi rencana kerja yang akan diterapkan. Dikhawatirkan, kebijakan yang diambil cenderung hanya tertuju pada capaian pertumbuhan ekonomi dan bukan bagaimana mewujudkan pemerataan. Oleh karena itu, **Publikasi Indeks Gini Kota Mojokerto** menjadi penting dan akan bermanfaat sebagai salah satu rujukan arah kebijakan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyusun sebuah gambaran pendapatan dalam hubungannya dengan perencanaan ekonomi Kota Mojokerto sebagai salah satu dasar/acuan bagi pemerintah Kota Mojokerto serta *stakeholders* lainnya agar potensi ekonomi dapat dioptimalkan dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Mojokerto. Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat indikator yang memberikan gambaran proporsi tingkat pendapatan yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah secara umum serta sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah. Demi mendapatkan informasi dan gambaran mengenai kesenjangan perlu diketahui tingkat kesenjangan

distribusi pendapatan melalui indeks gini (*Gini Ratio*) serta mengukur tingkat kesenjangan distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia sehingga diharapkan:

- a. Memberi gambaran tentang pendapatan perkapita masyarakat
- b. Memberikan gambaran tentang pengeluaran konsumsi perkapita
- c. Memberi gambaran kemajuan wilayah
- d. Menggambarkan ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk

1.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Indeks Gini Kota Mojokerto adalah:

1. Semakin terarahnya program kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan daya beli masyarakat Kota Mojokerto.
2. Semakin rendah ketimpangan ekonomi antar wilayah dan antar golongan masyarakat Kota Mojokerto seiring dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi sehingga bisa tercapai kemandirian ekonomi lokal.
3. Dihasilkannya dokumen Indeks Gini Kota Mojokerto yang dapat dipakai sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Mojokerto sehingga semua program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dapat saling bersinergi, baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun program sektoral dan wilayah dalam kerangka mengoptimalkan pencapaian kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang menjadi substansi dasar di dalam dokumen Indeks Gini Kota Mojokerto ini adalah gambaran dan analisis yang berkaitan dengan upaya mengurangi kesenjangan (*gap*) pendapatan masyarakat Kota Mojokerto oleh Pemerintah Kota Mojokerto yang ruang lingkungnya meliputi:

1. Pemetaan distribusi pendapatan masyarakat Kota Mojokerto melalui data sekunder dan primer.
2. Menganalisis serta merumuskan hasil pemetaan indeks gini ratio sehingga dapat tergambarkan kondisi distribusi pendapatan di Kota Mojokerto dalam uraian yang bisa dimengerti secara umum.
3. Memberikan rekomendasi program kebijakan untuk mengurangi kesenjangan Kota Mojokerto beserta pembagian perannya (*action plan*).

1.6 Sistematika Penulisan

Agar pembaca mudah mengikuti alur, uraian dalam publikasi ini dibagi menjadi 6 bab:

- Bab 1 Pendahuluan, membahas latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.
- Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori dan ukuran seputar ketimpangan pendapatan.
- Bab 3 Metodologi dan Sumber Data, mendeskripsikan sumber data yang digunakan berikut alat ukur yang dipakai untuk menghasilkan data ketimpangan pendapatan.
- Bab 4 Gambaran Umum, berisikan gambaran umum sosial ekonomi Kota Mojokerto.
- Bab 5 Pembahasan, membahas hasil pengolahan data dan visualisasi angka.
- Bab 6 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan, mendiskusikan temuan dari seluruh analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung perubahan indeks implisit (deflator) PDRB. Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Terdapat tiga macam cara/ pendekatan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi (*Output Approach*)

Menurut Pendekatan ini, Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai

sektor produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit/ sektor produksi dalam pendekatan tersebut dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha (sektor), yaitu:

- 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- 2) Pertambangan dan Penggalian;
- 3) Industri Pengolahan;
- 4) Pengadaan Listrik dan Gas;
- 5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang;
- 6) Konstruksi;
- 7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- 8) Transportasi dan Pergudangan;
- 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- 10) Informasi dan Komunikasi;
- 11) Jasa Keuangan dan Asuransi;
- 12) Real Estate;
- 13) Jasa Perusahaan;
- 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- 15) Jasa Pendidikan;
- 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- 17) Jasa lainnya.

2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan ini menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di suatu daerah dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Adapun balas jasa tersebut meliputi upah dan gaji, pendapatan sewa, pendapatan bunga dan keuntungan (semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya). PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa

diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dan adanya aktivitas produksi. Indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah.

3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Menurut Pendekatan ini Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Jenis pengeluaran tersebut adalah:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba;
- 2) konsumsi pemerintah;
- 3) pengeluaran investasi;
- 4) ekspor neto (*net export*).

2.2 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi merupakan pengeluaran total untuk membeli barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Sedangkan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga di bagi menjadi dua macam yaitu konsumsi makanan dan non makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk non makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun non makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi 3 yaitu ialah:

1. Faktor Ekonomi

Empat faktor yang menentukan tingkat konsumsi, yaitu:



a. Pendapatan Rumah Tangga (*Household Income*)

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin baik (tinggi) tingkat pendapatan, tingkat konsumsi juga makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar atau mungkin juga pola hidup menjadi semakin konsumtif.

b. Kekayaan Rumah Tangga (*Household Wealth*)

Kekayaan Rumah Tangga (*Household Wealth*) merupakan kekayaan rumah tangga riil (rumah, tanah, dan mobil) dan finansial (deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga). Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan *disposable*.

c. Tingkat Bunga (*Interest Rate*)

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi (*opportunity cost*) dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang ingin mengonsumsi dengan berutang dahulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan kartu kredit, biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik menunda/mengurangi konsumsi.

d. Perkiraan Tentang Masa Depan (*Household Expectation About The Future*)

Faktor-faktor internal yang dipergunakan untuk memperkirakan prospek masa depan rumah tangga antara lain pekerjaan, karier dan gaji yang menjanjikan, banyaknya anggota keluarga yang telah bekerja. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian domestik dan internasional, jenis-jenis dan arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.

2. Faktor Demografi

a. Jumlah Penduduk



Jumlah penduduk yang besar juga akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah. Pengeluaran konsumsi suatu daerah atau negara akan sangat besar, bila jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi.

b. Komposisi Penduduk

Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi, antara lain:

- a) Makin banyak penduduk yang berusia kerja atau produktif (15-64 tahun), makin besar tingkat konsumsi. Sebab makin banyak penduduk yang bekerja, penghasilan juga makin besar.
- b) Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga makin tinggi, sebab pada saat seseorang atau suatu keluarga makin berpendidikan tinggi maka kebutuhan hidupnya makin banyak.
- c) Makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan (urban), pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan.

3. Faktor-faktor Non Ekonomi

Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya saja, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat/ideal.

2.3 Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisis populasi yang berada di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-

rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan. Masalah utama dalam distribusi pendapatan sebuah daerah adalah ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dalam daerah tersebut, oleh karenanya sering juga disebut tingkat ketidakmerataan atau kesenjangan (*inequality*).

Cara distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pendapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

2.4 Ketimpangan Pendapatan dan Pembangunan

Salah satu tujuan pembangunan selain mengejar laju pertumbuhan ekonomi juga perlu memperhatikan aspek pemerataan. Ada dua argumen yang berkaitan dengan masalah pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan dengan pemerataan.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan adanya ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital insentive*), sehingga presentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar wilayah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah semakin melebar. Adapun faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Terdapatnya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah akan mendorong timbulnya ketimpangan antar daerah. Kandungan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, atau kesuburan lahan tentunya mempengaruhi proses pembangunan di masing-masing daerah. Ada daerah yang memiliki minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak memilikinya.

Ada daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tetapi daerah lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.

2. Perbedaan Kondisi Demografi

Faktor utama lain yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan antar daerah adalah jika terdapat perbedaan kondisi demografi yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografi meliputi tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan dan tingkah laku masyarakat daerah tersebut. Perbedaan kondisi demografi ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan antar daerah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi

penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa.

Mobilitas barang dan jasa (perdagangan) antar daerah jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bila kegiatan perdagangan (baik internasional maupun antar wilayah) kurang lancar maka proses penyamaan harga faktor produksi akan terganggu. Akibatnya penyebaran proses pembangunan akan terhambat dan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung menjadi tinggi. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antardaerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Bila mobilitas barang tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja di suatu daerah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan antar daerah akan cenderung tinggi. Mobilitas barang dan jasa ini mengacu pada penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas di dalam suatu daerah, seperti: jalan, jembatan, alat transportasi baik darat, laut maupun udara dan lain-lain.

4. Perbedaan Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah

Perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar daerah karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat

konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula, apabila konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapatnya lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Kedua, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografi (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah Investasi

Merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat menarik lebih banyak investasi pemerintah dan swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan tenaga kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya, bila investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada

pemerintah pusat, sehingga ketimpangan antar daerah cenderung tinggi. Akan tetapi sebaliknya bilamana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar daerah akan cenderung lebih rendah. Tidak demikian halnya dengan investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dalam hal ini kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah, sedangkan keuntungan lokasi tersebut ditentukan pula oleh ongkos transportasi baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Termasuk ke dalam keuntungan lokasi ini adalah keuntungan aglomerasi yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daerah tertentu. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana investasi cenderung lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kondisi ini menyebabkan perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah pedesaan.

2.5 Teknik Perhitungan Ketimpangan

Pendapatan regional yang diwakili oleh PDRB ibarat sepotong kue yang dimiliki suatu daerah. Ketika kue tersebut terbagi habis kepada seluruh penduduk dengan porsi yang berimbang, maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan di daerah tersebut merata. Sebaliknya, jika ada penduduk yang mendapat porsi besar sementara penduduk lain hanya mendapat sisanya, maka dikatakan terjadi ketimpangan di dalamnya yang bisa saja menyulut berbagai masalah sosial.

Ada beberapa alat ukur untuk mengukur ketimpangan, pada penelitian ini disajikan dua indikator untuk mengukur ketimpangan

distribusi pendapatan, yakni Gini Ratio, Kurva Lorens dan Ukuran Bank Dunia.

1. Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi juga ketidakmerataan pendapatan yang terjadi. Jika indeks gini sama dengan 0, maka terdapat pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, jika indeks gini bernilai 1, berarti ketimpangan atau ketidakmerataannya sempurna. Lemahnya ukuran Gini Ratio adalah besarnya nilai gini tidak bisa menunjukkan letak ketimpangan. Koefisien gini didasarkan pada Kurva Lorens, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

2. Kurva Lorens

Kurva Lorentz dalam teori ekonomi disebut kurva yang menunjukkan distribusi pendapatan dan mengukur tingkat ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan nasional. Pada Kurva Lorens garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Dimana jika kurva semakin mendekati garis diagonal maka distribusi pendapatan semakin merata.

3. Kriteria Bank Dunia

Kriteria bank Dunia ini, membagi jumlah penduduk ke dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. 20 % penduduk berpendapatan tinggi,
- b. 40 % berpendapatan menengah,
- c. 40 % berpendapatan rendah.

Kelompok pertama adalah bagian dari penduduk terkaya dan kelompok ketiga adalah bagian dari populasi termiskin. Kelompok kedua sering dikatakan sebagai masyarakat kelas menengah. *Relative inequality*

diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Adapun kriteria *relative inequality* adalah: distribusi pendapatan sangat pincang (*high inequality*), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP. *Moderate inequality* (kepincangan dianggap sedang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau GNP. *Low inequality* (distribusi pendapatan tidak terlalu pincang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.

2.6 Kategori Ketimpangan

Indeks Gini yang diperoleh juga bisa dihitung berdasarkan data pengeluaran. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 dan 1. Semakin besar angka ini berarti semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan pengeluaran. Indeks Gini bernilai nol artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,3$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0,3 \leq GR \leq 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat)
- $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan ukuran Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a) Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk

kurang dari 12 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi.

- b) Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- c) Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan rendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kota Mojokerto sedangkan objek penelitiannya adalah distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga di Kota Mojokerto.

3.2 Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang mungkin berkaitan dengan publikasi ini antara lain:

1. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mediami sebagian atau seluruh bangunan fisik/ sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur dalam arti kebutuhan sehari-hari diurus bersama dan jadi satu.
2. Anggota rumah tangga (ART)/ penduduk adalah seorang yang biasanya tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di dalam rumah waktu pendataan maupun sementara tidak ada. Yang bepergian walaupun kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan pindah/ akan meninggalkan rumah selama enam bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai ART. Seseorang yang telah tinggal di rumah tangga enam bulan atau lebih atau yang telah tinggal di dalam rumah tangga kurang dari enam bulan tetapi berniat menetap dimasukkan sebagai ART.
3. Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan. Akan tetapi, penggalan informasi pendapatan tidak semudah yang dibayangkan. Responden cenderung memberikan informasi yang tidak sebenarnya, sehingga menyebabkan data bias. Oleh karena itu, data pendapatan didekati menggunakan data pengeluaran. Asumsinya, tingkat pengeluaran penduduk sama dengan pendapatan yang diterima.

4. Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Konsumsi rumah tangga sendiri dibedakan menjadi dua kelompok yaitu konsumsi makanan dan bukan/ non makanan seperti perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi serta keperluan untuk pesta dan upacara. Konsumsi yang dimaksud tanpa memperhatikan asal barang (membeli, hasil sendiri atau pemberian) serta terbatas pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga saja tidak termasuk konsumsi atau pengeluaran untuk usaha.
5. Pengeluaran perkapita adalah pengeluaran rata-rata per kepala atau per ART.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah Deskriptif Kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan. Dimana penelitian ini mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis serta mendeskripsikan data dan informasi-informasi yang ada tentang kenyataan yang terjadi mengenai distribusi pendapatan. Adapun Data utama yang digunakan adalah data sekunder, tentang distribusi pendapatan dengan menggunakan *proxy* pengeluaran/konsumsi rumah tangga sebagai pengganti data pendapatan masyarakat, karena data pendapatan sendiri di Indonesia masih belum tersedia. Di samping data sekunder juga dilakukan pengumpulan data primer dengan pendekatan observasi dan menggunakan kuesioner terhadap pengeluaran rumah tangga di Kota Mojokerto.

Survei langsung yang digunakan untuk memperoleh data pendapatan masyarakat kadangkala masih sulit dilakukan. Penyebab utamanya adalah teknis wawancara. Karena itu pendapatan rumah tangga dalam hal ini menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari besarnya konsumsi atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Peningkatan

konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, terutama pengeluaran untuk non makanan, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan. Rumah tangga dengan pendapatan rendah akan mendahulukan pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan dengan kebutuhan non makanan. Pada kelompok masyarakat seperti ini terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi makanan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, maka akan terjadi pergeseran pola konsumsi pengeluaran.

Dimana pada akhirnya akan terjadi penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan sebaliknya terjadi peningkatan pada pengeluaran konsumsi non makanan. Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah sementara elastisitas permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi. Keadaan akan semakin jelas pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan sebagian besar akan digunakan untuk barang non makanan, ditabungkan atau bahkan diinvestasikan. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisi pengeluaran dapat memberikan indikasi perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Ada dua macam metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data primer ini dengan cara survei.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BPS, maupun instansi-instansi lainnya.

3.5 Populasi dan Sampling

3.5.1. Populasi

Populasi merupakan sekelompok objek yang dapat dijadikan sumber penelitian. Dalam pengertian lain, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Penentuan populasi harus dimulai dengan penentuan secara jelas mengenai populasi yang menjadi sasaran penelitiannya yang disebut populasi sasaran yaitu populasi yang akan menjadi cakupan kesimpulan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Rumah Tangga dan penduduk yang berada di Kota Mojokerto yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Prajurit Kulon.

3.5.2. Teknik Sampling

Teknik Sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tempat pengambilan sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan teknik sampling Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS yaitu dengan menggunakan metode *two stages one phase stratified sampling*: pada tahap pertama adalah pemilihan kerangka sampel daftar blok sensus hasil sensus penduduk pada tahapan ini juga dapat diketahui muatan dari blok sensus (pemukiman biasa, pemukiman mewah, pemukiman kumuh), informasi daerah sulit/ tidak sulit, dan klasifikasi desa/ kelurahan (*rural/urban*). Pada tahap pertama untuk blok

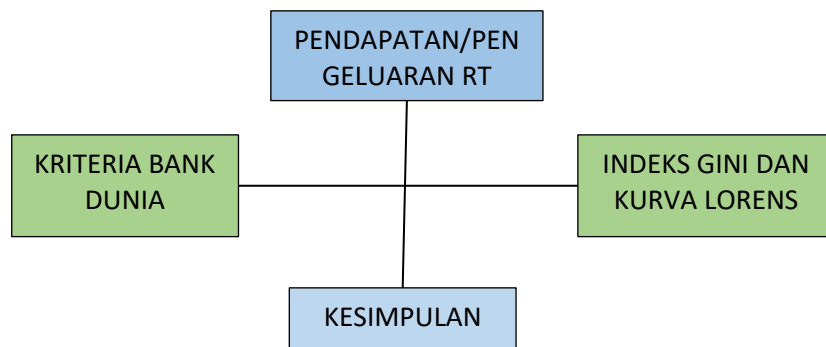
sensus khusus tidak akan terpilih sebagai sampel susenas. Pemilihan kerangka sampel tahap ke dua adalah pemilihan rumah tangga hasil pemuktahiran di setiap blok sensus terpilih. Setiap blok sensus terpilih hanya diambil sebanyak 10 rumahtangga.

Sampel yang digunakan untuk indeks gini Kota Mojokerto adalah sebanyak 600 rumah tangga yang terdiri dari 480 sampel Susenas dan 120 sampel tambahan yang tersebar di 3 kecamatan dan 18 kelurahan. Data yang dihasilkan cukup representatif untuk menghasilkan estimasi sampai dengan tingkat kecamatan dan kabupaten/ kota.

3.6 Kerangka Pemikiran

Urutan kegiatan yang dilakukan untuk menghitung Indeks Gini Kota Mojokerto adalah sebagai berikut: PENGUMPULAN DATA PENGELUARAN RT → PENGOLAHAN INDEKS GINI DAN KRITERIA BANK DUNIA → ANALISIS HASIL PENGOLAHAN → PENARIKAN KESIMPULAN.

Data pendapatan yang didekati dengan data pengeluaran rumah tangga digunakan sebagai dasar penghitungan indeks gini, kurva lorens dan ukuran ketimpangan menurut Kriteria Bank Dunia. Berdasarkan hasil yang diperoleh selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.



3.7 Metode Analisis Data

3.7.1. Metode Pengeluaran

Pengukuran distribusi pendapatan biasanya didekati dengan menggunakan data pengeluaran, karena data pendapatan masyarakat

dalam kenyataannya masih sangat sulit diperoleh. Dalam hal ini analisis tingkat distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga dari hasil Susenas dan survei tambahan sebesar 600 responden terhadap rumahtangga di seluruh kecamatan di Kota Mojokerto. Bagaimana pun juga, distribusi pengeluaran tidak akan sama dengan distribusi pendapatan. Namun dengan cara ini dianggap sebagai pendekatan yang lebih rasional untuk melihat trend dari distribusi pendapatan, Melalui data survei tersebut, nilai pendapatan masyarakat Kota Mojokerto diestimasi dari data konsumsi dengan pendekatan rata-rata pengeluaran rumahtangga perbulan. Data yang dikumpulkan adalah data konsumsi yang mencakup seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Mengingat jumlah komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat sangat banyak dan beragam, maka dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu konsumsi kelompok makanan dan konsumsi kelompok non makanan.

1. Konsumsi makanan, meliputi:

- a. Konsumsi padi-padian (Beras, jagung terigu, dan lain-lain),
- b. Konsumsi umbi-umbian (ketela, kentang, sagu, dan lain-lain),
- c. Konsumsi ikan/ udang/ cumi/ kerang (segar dan diawetkan),
 - (a) Konsumsi daging (sapi, kerbau, kambing, ayam dan lain-lain),
 - (b) Konsumsi telur dan susu,
 - (c) Konsumsi sayur-sayuran (bayam, wortel, cabe, dan lain-lain),
 - (d) Konsumsi kacang-kacangan,
 - (e) Konsumsi buah-buahan,
 - (f) Konsumsi Minyak dan lemak,
 - (g) Konsumsi bahan minuman (gula, teh, kopi, coklat, sirup, dan lain-lain),
 - (h) Konsumsi bumbu-bumbuan (garam, kemiri, merica, terasi, kecap, dan lain-lain),
 - (i) Konsumsi lainnya (mie instan/ basah, bihun, makaroni, kerupuk dan lain-lain),

- (j) Konsumsi makanan dan minuman jadi (roti, biskuit, bakso, nasi rames, minuman beralkohol dan non alkohol),
- (k) Konsumsi tembakau dan sirih.

2. Konsumsi non makanan, meliputi:

- a. Perumahan dan fasilitas rumahtangga (sewa/ parkir sewa, pemeliharaan/ perbaikan ringan, rekening listrik/ air/ telepon, gas, minyak tanah, pulsa, dan lain-lain),
- b. aneka barang dan jasa (sabun/ kosmetik, biaya kesehatan, pendidikan, transport, jasa lainnya,
- c. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala,
- d. Barang tahan lama (alat rumahtangga, elektronik dan lain-lain),
- e. Pajak, pungutan dan asuransi,
- f. Keperluan pesta dan upacara, tidak termasuk makanan. Untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Sedang untuk pengeluaran non makanan ditanyakan kondisi sebulan yang lalu dan satu tahun terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian.

Desain kuesioner secara detail dibuat dengan harapan responden mampu mengingat nilai konsumsi yang dikeluarkannya.

3.7.2. Metode Perhitungan Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Data yang digunakan untuk menghitung distribusi pendapatan dengan menggunakan perhitungan *Gini Ratio* adalah dengan menggunakan data jumlah pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Data pengeluaran/ konsumsi rumah tangga di gunakan untuk menggantikan data pendapatan penduduk, karena data pendapatan penduduk belum tersedia di Indonesia. Walaupun data pengeluaran penduduk tersebut nilainya tidak menggambarkan pendapatan riil penduduk akan tetapi secara empiris terbukti dapat memberikan gambaran pendapatan penduduk untuk dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

Formula yang digunakan untuk menghitung Indeks Gini (*Gini Ratio*) adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum (X_i - X_{i-1}) (Y_i + Y_{i-1})$$

Dimana:

GR : Indeks Gini (*Gini Ratio*)

X_i : Persentase Jumlah Penduduk Kumulatif ke-i

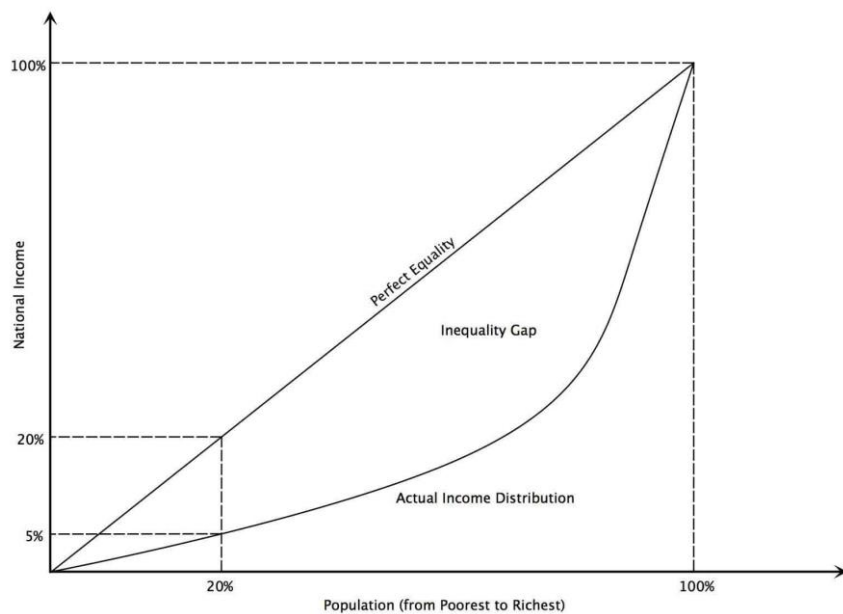
Y : Persentase Jumlah Pengeluaran Penduduk Kumulatif ke-i

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, dengan kriteria apabila:

- a) $GR < 0,3 \rightarrow$ Ketimpangan Rendah
- b) $0,3 \leq GR \leq 0,5 \rightarrow$ Ketimpangan Sedang
- c) $GR > 0,5 \rightarrow$ Ketimpangan Tinggi

3.7.3. Kurva Lorens

Kurva ini digunakan untuk menunjukkan hubungan distribusi pendapatan dengan pemerataan pendapatan. Dimana semakin dekat kurva Lorens dengan garis diagonal, maka distribusi pendapatan semakin merata.



Gambar 3.1 Kurva Lorens

Sumber: <https://www.intelligenteconomist.com/Lorens-curve-gini-coefficient/>

3.7.4. Kriteria Bank Dunia

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan *Gini Ratio* baru menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Sejauh mana atau berapa bagian yang diterima oleh kelompok berpendapatan terendah/miskin belum nampak jelas. Sehubungan dengan ini, ukuran yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia (*World Bank*).

Kriteria bank Dunia ini, membagi jumlah penduduk ke dalam tiga kelompok, yaitu:

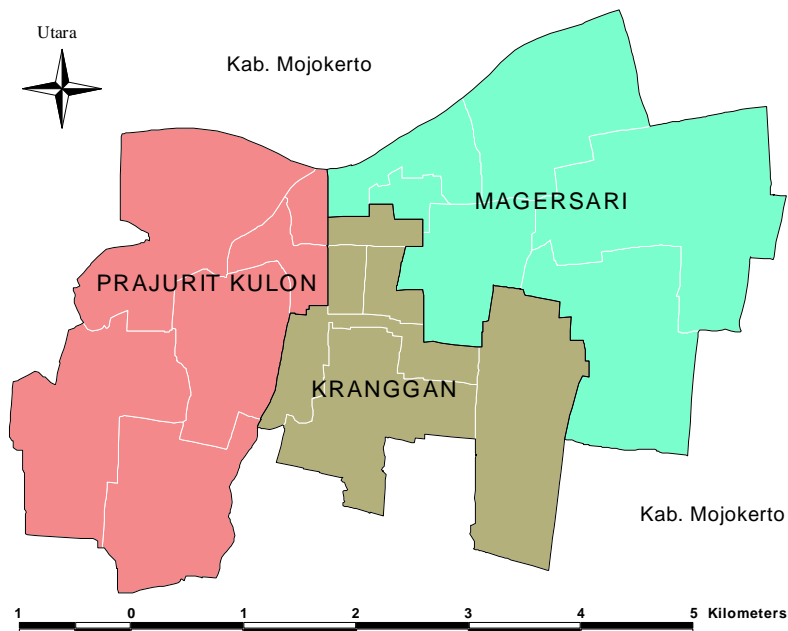
- a. 20 % penduduk berpendapatan tinggi,
- b. 40 % berpendapatan menengah,
- c. 40 % berpendapatan rendah.

Kelompok pertama adalah bagian dari penduduk terkaya (20 persen penduduk berpendapatan tinggi) dan kelompok ketiga (40 persen berpendapatan rendah) adalah bagian dari populasi termiskin. Kelompok kedua (40 persen berpendapatan menengah) sering dikatakan sebagai masyarakat kelas menengah.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Letak Geografis

Kota Mojokerto terkenal dengan sebutan kota onde-onde karena banyaknya industri onde-onde di kota ini. Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, terbentang pada $7^{\circ} 27' 0,16''$ sampai $7^{\circ} 29' 37,11''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 27' 24''$ Bujur Timur. Kota Mojokerto memiliki luas wilayah mencapai $16,47 \text{ km}^2$ yang terbagi menjadi 3 kecamatan yakni Kecamatan Prajurit Kulon di sebelah timur, Kecamatan Kranggan di tengah wilayah dan Kecamatan Magersari di sebelah barat. Masing-masing Kecamatan di Kota Mojokerto memiliki 6 Desa/ Kelurahan. Dilihat dari luas wilayah tiap kecamatan, maka luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Magersari, yaitu $6,62 \text{ km}^2$ (40%) sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kranggan dengan luas yang hanya $3,62 \text{ km}^2$ (22%). Secara administratif, Kota Mojokerto dibagi menjadi 3 Kecamatan, 18 Kelurahan, 676 Rukun Tetangga dan 175 Rukun Warga.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Mojokerto

Batas wilayah administrasi Kota Mojokerto

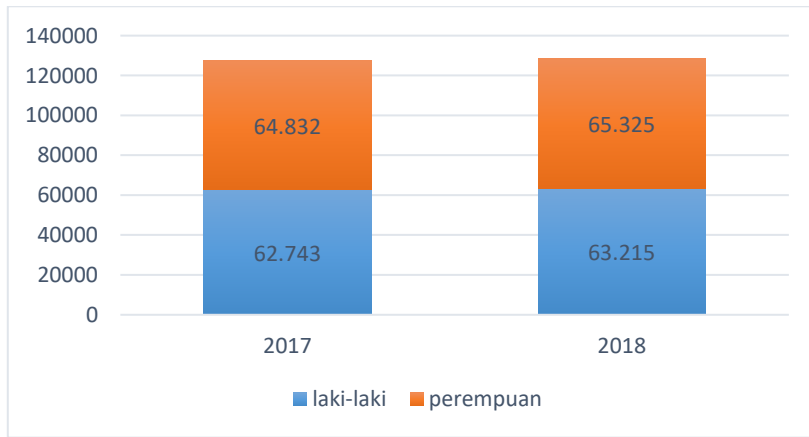
- a. Sebelah Utara : Sungai Brantas
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Secara topografi, wilayah Kota Mojokerto terletak di daerah dataran rendah, ketiga kecamatan di Kota Mojokerto berada di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 22 meter di atas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0 - 3%. Letak Kota Mojokerto yang berada di sekitar garis khatulistiwa, sebagaimana kabupaten/kota lainnya di Pulau Jawa, menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan musim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jumlah curah hujan per bulan selama tahun 2018 tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan rata-rata curah hujan yaitu 662,2 mm. Hujan tidak turun selama bulan Mei, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Kota Mojokerto dengan luas wilayah terkecil di Indonesia dan kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan terjadinya pergeseran lahan dari agraris menjadi non agraris. Sebagian besar dari lahan tersebut berasal dari lahan pertanian yang sejak tiga tahun terakhir telah bergeser menjadi lahan perumahan maupun perkantoran dan ruko-ruko. Pada tahun 2017, tanah yang bukan sawah tersebut yakni seluas 1.472,88 hektar, terdiri dari 1.234,84 hektar digunakan untuk bangunan perumahan, halaman, dan pekarangan. Selebihnya merupakan tegal, kebun, dan lainnya.

4.2. Kependudukan

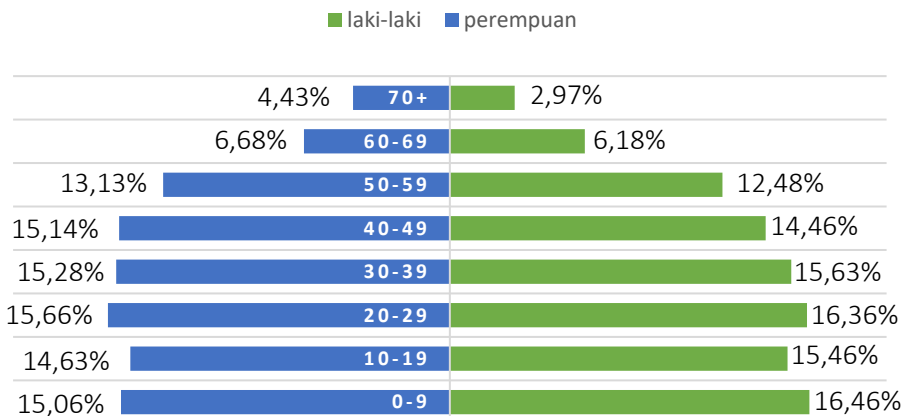
Mengacu pada hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2015-2025, Kota Mojokerto pada tahun 2018 memiliki 128.540 penduduk. Dengan jumlah tersebut dan luas wilayah sebesar 20,21 km², maka kepadatan penduduk Kota Mojokerto adalah sebesar 6.260 jiwa per km². Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 63.215 jiwa dan sisanya sebanyak 65.325 jiwa adalah

perempuan. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun dengan perbandingan yang tetap apabila dilihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin.



Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dari proporsi jenis kelamin, sex ratio Kota Mojokerto tahun 2018 adalah sebesar 96,77. Artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.



Gambar 4.3 Persentase Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018



Apabila dilihat secara kelompok umur, maka struktur umur penduduk Kota Mojokerto adalah struktur umur muda yang artinya jumlah penduduk umur muda yang terdiri dari umur remaja dan umur produktiflah yang dominan, sedangkan untuk umur tua masih relatif sedikit. Jumlah penduduk dalam usia produktif (15-64 tahun) ada sebanyak 92.296 jiwa, sedangkan penduduk berusia tua (di atas 65+) berjumlah 8.038 jiwa. Sisanya, sebanyak 28.206 jiwa adalah penduduk usia 0–14 tahun. Dengan memperhatikan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat diketahui pula angka ketergantungan.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau disebut beban ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan produk dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Tidak ada perubahan signifikan untuk beban ketergantungan Kota Mojokerto pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2018, setiap 100 orang yang berusia produktif memiliki tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan dianggap tidak lagi produktif. Perbandingan rasio ketergantungan Kota Mojokerto tahun 2017 dan 2018 ditampilkan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)	
	2017	2018
0-14	28.228	28.206
15-64	91.657	92.296
65+	7.690	8.038
Rasio Ketergantungan	39,19%	39,27%

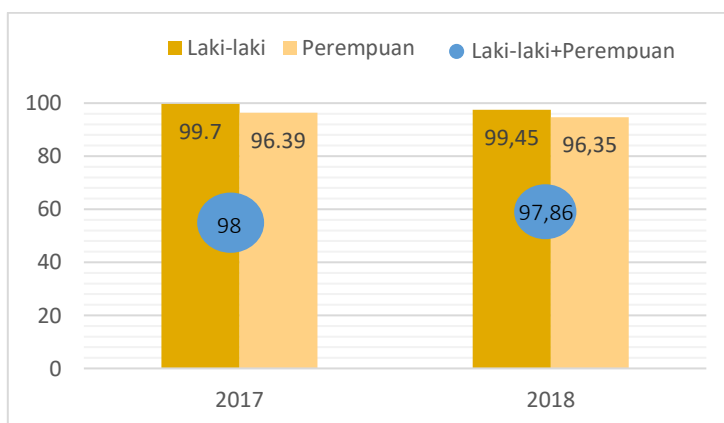
Pada tahun 2018, penduduk Kota Mojokerto usia 10 tahun ke atas yang sudah menikah ada sebanyak 58,89 persen. Sisanya sebanyak 30,81 persen belum menikah dan 10,3 persen telah bercerai. Proporsi status kawin penduduk Kota Mojokerto berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan melalui tabel 4.2.

Tabel 4.2 Proporsi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin (persen)

Status Perkawinan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Belum Kawin	36,92	24,98
Kawin	59,60	58,21
Cerai Hidup	1,62	4,41
Cerai Mati	1,85	12,39

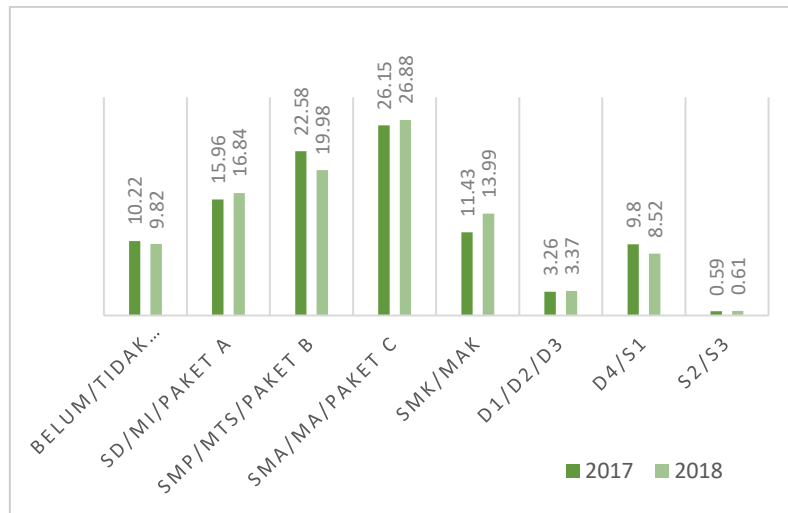
4.3. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang memiliki peran penting terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah demi tercapainya keberhasilan pembangunan manusia. Melalui peningkatan di bidang pendidikan diharapkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas akan tercapai. Kemampuan baca-tulis merupakan kemampuan intelektual minimum karena sebagian besar informasi dan ilmu pengetahuan diperoleh melalui membaca. Maka, ukuran dasar tingkat pendidikan adalah kemampuan penduduk usia 10 tahun ke atas untuk baca-tulis huruf latin dan atau huruf lainnya (melek huruf). Berdasarkan informasi yang tersedia, berikut adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis.



Gambar 4.4 Persentase Penduduk Kota Mojokerto Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca

Pada tahun 2018, masih ada 3,92 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Mojokerto yang buta huruf. Mirisnya, angka ini meningkat daripada tahun sebelumnya. Persentase penduduk laki-laki yang buta huruf sebesar 2,51 persen, sementara persentase penduduk perempuan di Kota Mojokerto yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis adalah 5,28 persen. Di sini terlihat bahwa persentase buta huruf laki-laki lebih rendah dibanding angka buta huruf perempuan.



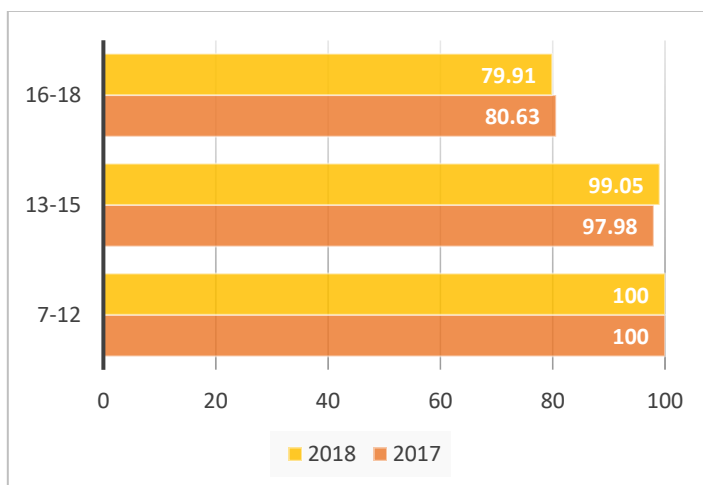
Gambar 4.5 Persentase Penduduk Kota Mojokerto Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki menjadi indikator pokok kualitas SDM. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan mencerminkan kualitas penduduk di suatu daerah. Kota Mojokerto didominasi oleh penduduk dengan ijazah tertinggi SMA/ MA/ Paket C. Penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi (sarjana dan diploma) ada sebanyak 11,89 persen. Hal yang perlu diperhatikan adalah hingga tahun 2018 masih ada 9,82 persen penduduk Kota Mojokerto yang belum memiliki ijazah, atau dengan kata lain belum pernah menamatkan Sekolah Dasar. Tabel 4.3 menunjukkan jumlah penduduk Kota Mojokerto usia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi, 2018

Pendidikan Tertinggi	Persentase Penduduk	
	Laki-laki	Perempuan
Belum/Tidak Tamat SD	6,43	13,03
SD/MI/Paket A	13,77	19,74
SMP/MTs/Paket B	19,59	20,34
SMA/MA/Paket C	27,14	26,63
SMK/MAK	18,37	9,85
D1/D2/D3	4,04	2,74
D4/S1	9,81	7,31
S2/S3	0,85	00,38
Total	100,00	100,00

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah menjadi indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS, maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Kota Mojokerto mengalami peningkatan Angka Partisipasi Sekolah selama dua tahun terakhir ini untuk penduduk usia 13-15. Pada tahun 2017, penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah/ tidak lagi bersekolah ada sebanyak 2,02 persen. Pada tahun 2018, hanya 0,95 penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah/tidak lagi bersekolah. Berbeda untuk penduduk usia 16-18 tahun, pada 2017 19,37 persen penduduk dalam kelompok usia ini tidak bersekolah/ tidak lagi bersekolah. Pada tahun 2018, persentasenya naik menjadi 20,09 persen. Namun demikian, meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mnegenyam pendidikan.



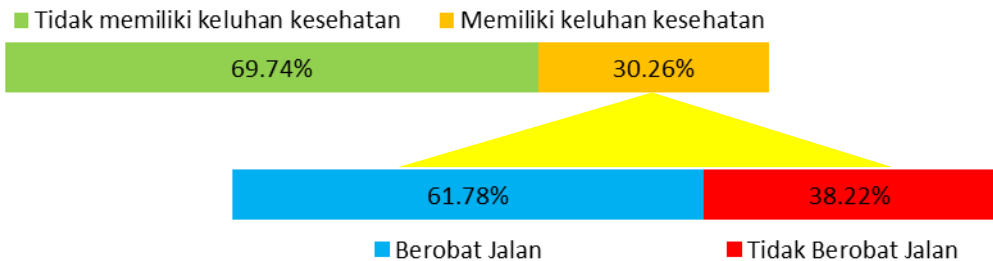
Gambar 4.6 Angka Partisipasi Sekolah Kota Mojokerto

4.4. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan adalah hak dasar manusia dan merupakan salah satu aspek penentu kualitas sumber daya manusia yang penting untuk dicermati. Sumber daya manusia yang sehat secara fisik diharapkan akan baik pula dari sisi kualitas, terutama untuk berkiprah dalam pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

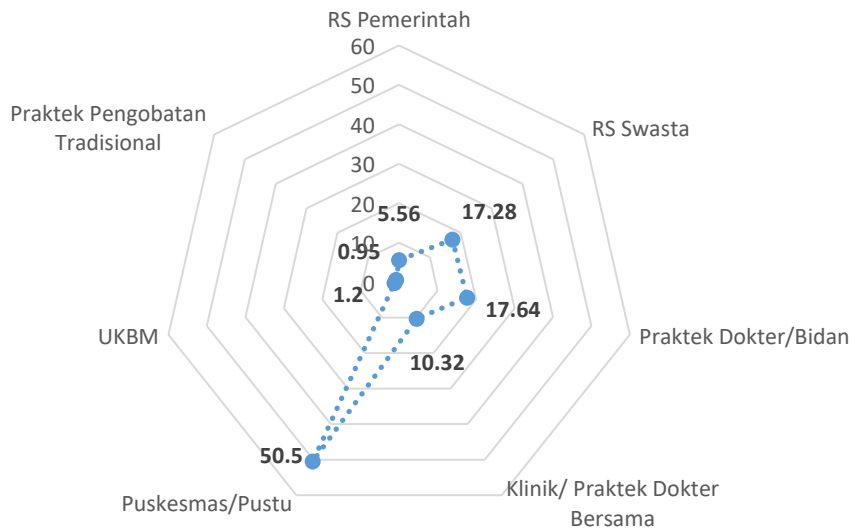
Kesakitan (morbiditas) diartikan sebagai semua penyimpangan dari keadaan sehat. Angka kesakitan dapat dijadikan indikator yang mengukur status kesehatan masyarakat. Angka kesakitan merupakan keluhan atas suatu penyakit yang dirasakan oleh penderita dan bukan atas hasil pemeriksaan dokter atau petugas lainnya. Pada tahun 2017, 35,62 persen penduduk Kota Mojokerto mengaku memiliki keluhan kesehatan. Sedangkan pada 2018 hanya 30,26 persen penduduk yang mengatakan bahwa ia memiliki keluhan kesehatan. Dalam mengatasi keluhan kesehatan tersebut, 61,78 persen penduduk melakukan berobat jalan sedangkan sisanya 38,22 memilih tidak berobat jalan. Beberapa alasan penduduk tidak melakukan berobat jalan meski ia memiliki keluhan kesehatan yaitu:

mengobati sendiri (79,23%); merasa tidak perlu (16,2%); waktu tunggu pelayanan lama (1,08%); tidak ada yang mendampingi (0,55%); dan lainnya (2,94%).



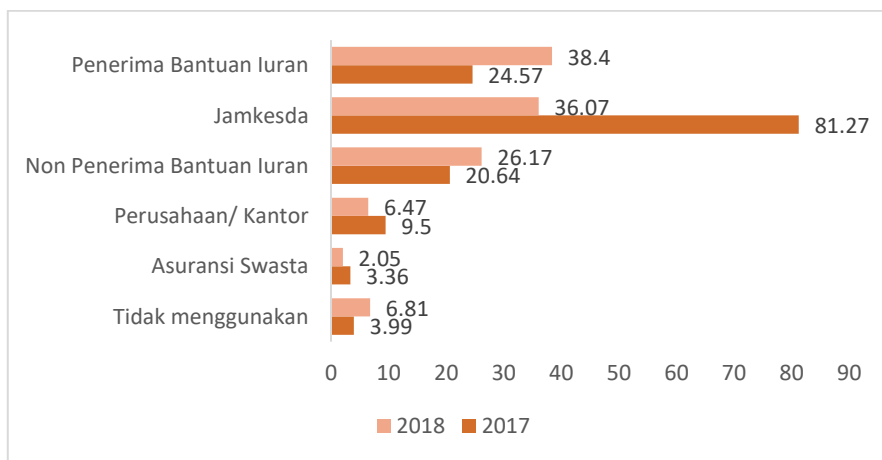
Gambar 4.7 Persentase Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Keluhan Kesehatan, 2018

Sebanyak 50,5 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan melakukan berobat jalan di Puskesmas atau Pustu. Selain itu, 17,64 persen di antara mereka memilih Praktek Dokter/ Bidan sebagai tempat berobat jalan. Sedangkan sisanya berobat di tempat-tempat lain seperti ditunjukkan dalam gambar 4.8.



Gambar 4.8 Persentase Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Tempat Berobat Jalan, 2018

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Jaminan Kesehatan Nasional ini diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Selain JKN, beberapa jaminan kesehatan lain juga dipilih oleh penduduk Kota Mojokerto. Jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh penduduk Kota Mojokerto adalah Penerima Bantuan Iuran. Di samping itu, pada tahun 2018 masih ada sekitar 6,81 persen penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan.

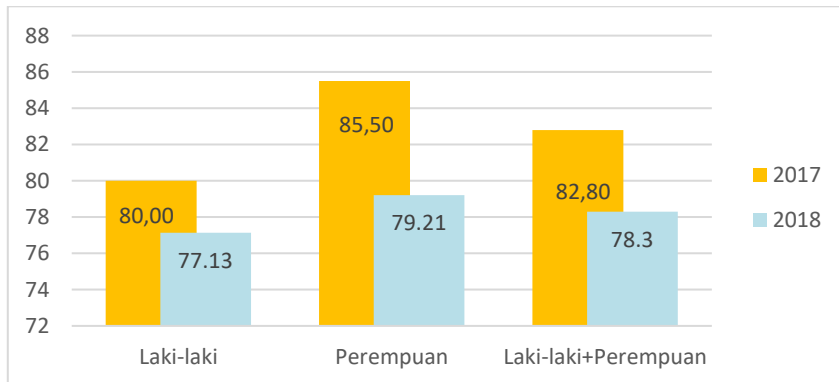


Gambar 4.9 Proporsi Penduduk Kota Mojokerto Berdasarkan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki

Pada tahun 2017, Jamkesda adalah jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki oleh penduduk Kota Mojokerto. Proporsinya mencapai 81,27 persen. Pada tahun 2018, proporsi pengguna Jamkesda turun menjadi 36,07 persen, lebih banyak penduduk yang menerima bantuan iuran yaitu 38,4%. Pada tahun 2017, penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun ada sebanyak 3,99 persen. Pada tahun 2018, proporsinya justru naik menjadi 6,81 persen.

Pada tahun 2018, sebanyak 6,93 persen penduduk Kota Mojokerto pernah dirawat inap. Tingkat penggunaan jaminan kesehatan saat dirawat

inap turun selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2017, 82,8 persen penduduk Kota Mojokerto menggunakan jaminan kesehatan sewaktu rawat inap. Sedangkan pada 2018, hanya sebanyak 78,3 persen.

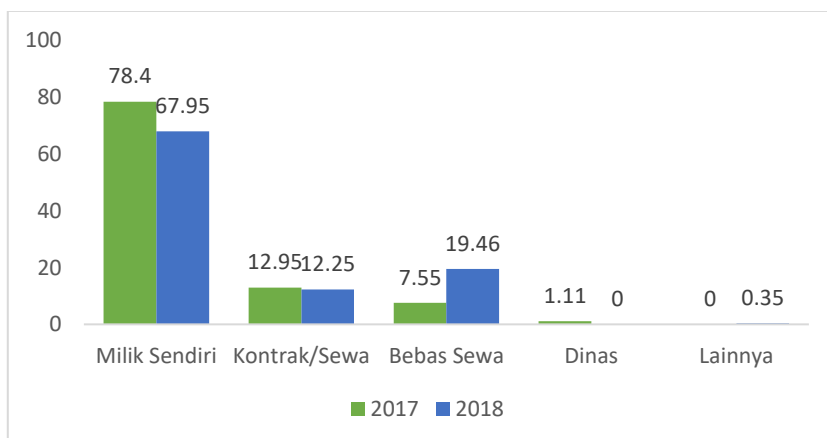


Gambar 4.10 Proporsi Penduduk Kota Mojokerto yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Rawat Inap

4.5. Perumahan

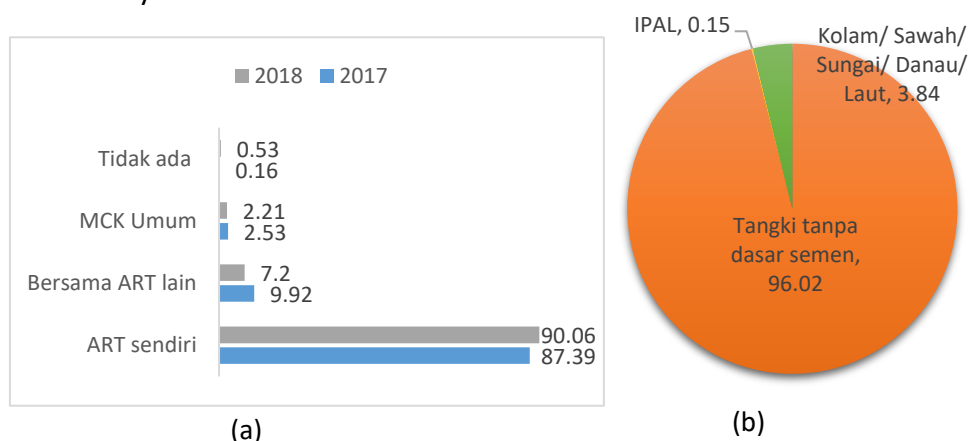
Kebutuhan pokok manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan diartikan sebagai rumah atau tempat tinggal. Secara fisik, rumah dapat dijadikan tempat berkumpul dan berinteraksi antar anggota keluarga serta bersosialisasi dengan lingkungan. Kondisi perumahan menunjukkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Secara umum, rumah dikatakan layak huni jika memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat serta mempunyai luas lantai yang mencukupi (sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya). Selain itu, rumah layak huni juga ditentukan oleh fasilitas penerangan, air minum, dan tempat fasilitas pembuangan akhir kotoran/ tinja.

Pada tahun 2018, sekitar 67,95 persen rumah tempat tinggal yang ditempati oleh rumah tangga di Kota Mojokerto merupakan rumah milik sendiri dengan luas lantai terbanyak di atas 50 m². Berdasarkan kualitas rumah, ada sekitar 99,48 persen rumah di Kota Mojokerto menggunakan lantai bukan tanah dengan atap terluas adalah genteng yakni 90,60 persen dan dinding terluas adalah tembok sebesar 95,53 persen. Status kepemilikan rumah tempat tinggal disampaikan sebagai berikut.



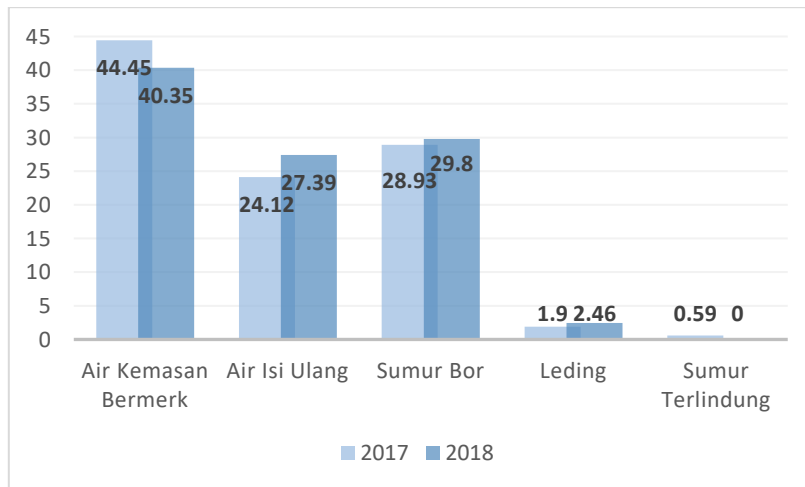
Gambar 4.11 Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Berdasarkan Status Rumah yang Ditempati

Pada tahun 2018, 90,06 persen rumah tangga di Kota Mojokerto menempati rumah dengan fasilitas tempat buang air besar digunakan hanya oleh ART itu sendiri. Angka ini naik sekitar 2,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain sudah mempunyai tempat buang air besar sendiri, tempat pembuangan akhir tinja rumah tangga di Kota Mojokerto sudah banyak yang memenuhi syarat kesehatan. Sebanyak 96,02 persen rumah tangga menggunakan tangki dan 0,15 persen menggunakan IPAL. Namun sebanyak 3,84 rumah tangga masih membuang tinja di Kolam/ Sawah/ Sungai/ Danau/ Laut. Proporsi ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.



Gambar 4.12 Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Berdasarkan Penggunaan Fasilitas BAB (a) dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2018 (b)

Air minum sebagai kebutuhan utama tubuh hendaknya harus tersedia setiap saat. Untuk keperluan air minum, sumber air baku yang dapat digunakan bisa terdiri dari mata air, air permukaan (sungai, danau, waduk, dll), air tanah (sumur gali, sumur bor), maupun air hujan. Dari segi kualitas, mata air lebih jernih dibandingkan air permukaan pada umumnya, sehingga lebih baik digunakan sebagai air minum. Rumah tangga di Kota Mojokerto 67,62 persen membeli air minumnya, mayoritas menggunakan air kemasan bermerk.

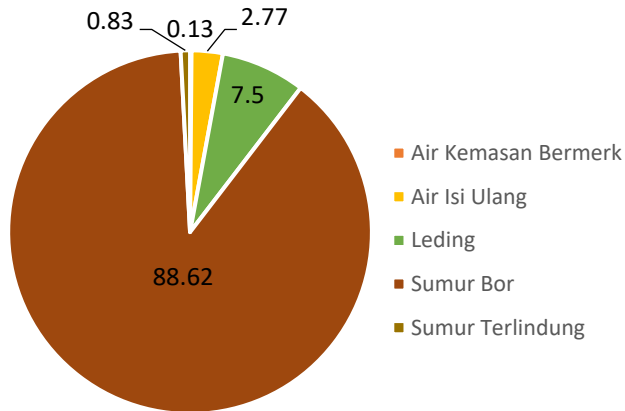


Gambar 4.13 Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Berdasarkan Sumber Air Minum

Pada tahun 2017, rumah tangga yang menggunakan air kemasan bermerk untuk memenuhi kebutuhan air minumnya ada sebanyak 44,45 persen. Pada tahun 2018, persentasenya menurun menjadi 40,35 persen. Berbeda dengan rumah tangga yang memenuhi kebutuhan air minum melalui air isi ulang, terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan air isi ulang untuk kebutuhan air minum. Pada tahun 2017, ada sebanyak 24,12% dan meningkat menjadi 27,39 persen pada tahun 2018. Pengguna sumur bor, leding, dan sumur terlindung masing-masing sejumlah 28,93 persen, 1,9 persen, dan 0 persen pada 2018.

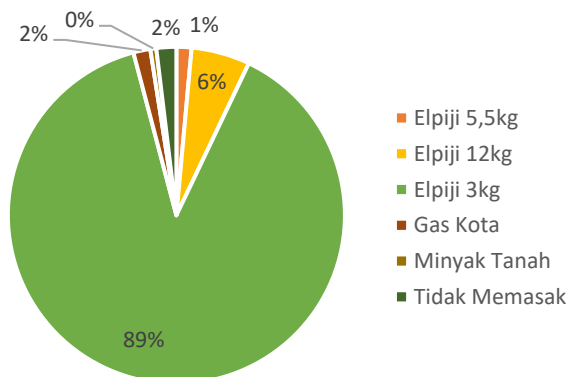
Untuk keperluan air mandi, rumah tangga di Kota Mojokerto sebagian besar menggunakan air yang bersumber dari sumur bor. Persentase rumah

tangga ini mencapai 88,62%. Selain itu, sebanyak 7,5% rumah tangga menggunakan leding. Sisanya masing-masing sebanyak 2,77%, 0,83%, dan 0,13% menggunakan air isi ulang, sumur terlindung, dan air kemasan bermerk.



Gambar 4.14 Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Berdasarkan Sumber Air Mandi

Terdapat beberapa jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak oleh penduduk Kota Mojokerto. Mayoritas rumah tangga menggunakan elpiji 3 kilogram sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Sebagian kecil rumah tangga menggunakan elpiji 5,5 kg (1,45%), elpiji 12 kg (5,63%), gas kota (1,63), minyak tanah (0,57), dan sebanyak 1,91 persen rumah tangga memilih tidak memasak.



Gambar 4.15 Persentase Rumah Tangga di Kota Mojokerto Berdasarkan Bahan Bakar Utama untuk Memasak

4.6. Perekonomian

Perekonomian Kota Mojokerto terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 yang mencapai 6.353.870,7 juta rupiah. Nilai tersebut meningkat 505.636 juta rupiah dibanding PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017 yang sebesar 5.848.234,7 juta rupiah. Total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan PDRB Per kapita. PDRB Per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2018, PDRB per kapita Kota Mojokerto mencapai Rp 49,32 juta rupiah. Sedangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2018, mencapai 4.719.232,4 juta rupiah. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 4.460.444,9 juta rupiah. Peningkatan tersebut menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto sebesar 5,8 persen.

Pada tahun 2018, lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum (I) serta Transportasi dan Pergudangan (H) masing-masing dengan tingkat laju pertumbuhan sebesar 7,89 persen dan 6,45 persen merupakan laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya, seperti disajikan pada Tabel 4.4. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan diduga karena tumbuh pesatnya pembangunan fisik baik yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta serta maraknya bisnis penginapan (hotel) dan restoran akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya sektor pariwisata di Kota Mojokerto. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) merupakan lapangan usaha yang paling rendah laju pertumbuhannya yaitu hanya sebesar 0,77 persen. Hal ini disebabkan penurunan produksi hasil pertanian yang lebih disebabkan oleh konversi lahan.

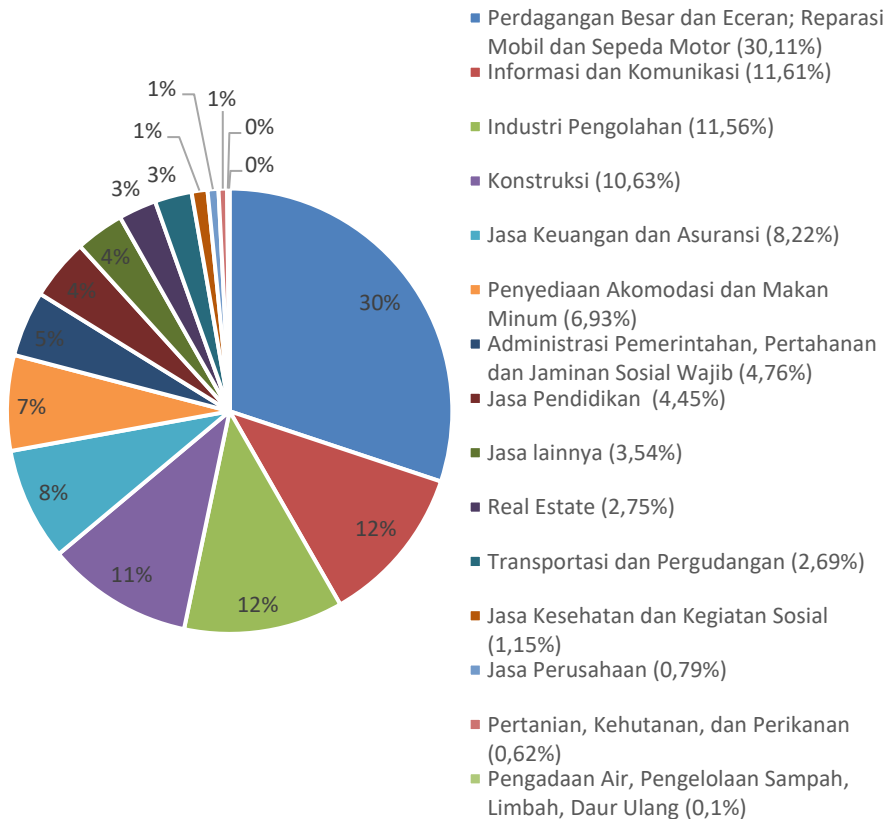
Tabel 4.4 PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Pertumbuhannya Menurut Lapangan Usaha

Kode	Lapangan Usaha	2017* (juta rupiah)	2018** (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.355,7	25.551,20	0,77
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
C	Industri Pengolahan	479.254,5	506.999,50	5,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.996,8	4.191,60	4,88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	5.837,9	6.085,00	4,23
F	Konstruksi	483.704,0	511.849,40	5,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.327.943,0	1.410.378,00	6,21
H	Transportasi dan Pergudangan	115.047,8	122.207,60	6,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281.231,9	303.425,80	7,89
J	Informasi dan Komunikasi	644.050,1	685.621,50	6,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	325.381,6	340.463,90	4,64
L	Real Estate	123.842,6	128.755,60	3,97
M,N	Jasa Perusahaan	33.001,9	34.764,20	5,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	199.252,2	208.050,20	4,42
P	Jasa Pendidikan	192.720,4	200.803,10	4,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52.714,5	55.684,80	5,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	167.110,0	174.401,00	4,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4.460.444,9	4.719.232,4	5,80

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2019

Kota Mojokerto mempunyai potensi utama di sektor perdagangan yang menyumbang cukup besar dalam PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang besar di Kota Mojokerto. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB dari tahun ke tahun. Sumbangan terbesar PDRB Kota Mojokerto tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 30,11 persen; kemudian lapangan usaha Informasi dan Komunikasi 11,61 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar

11,56 persen; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,22 persen; dan lapangan usaha kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,93 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya di bawah 5 persen.



Gambar 4.16 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, PDRB juga dapat dilihat melalui pengeluaran (PDRB Pengeluaran). PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Perhitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran tidak terlepas dari perhitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha namun tetap dihitung secara independen menggunakan data dasar yang berbeda.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa terjadi peningkatan pada PDRB Kota Mojokerto. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun

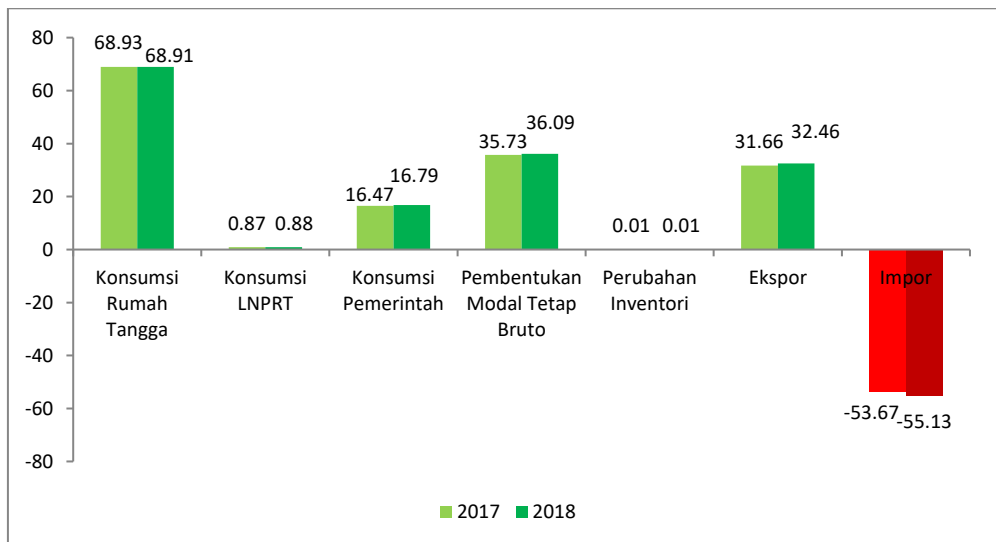
perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Tabel 4.5 PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Pertumbuhannya Menurut Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	2017* (juta rupiah)	2018** (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
Konsumsi Rumah Tangga	3.039.965,3	3.191.768,8	4,99
Konsumsi LNPRT	33.150,0	35.196,2	6,17
Konsumsi Pemerintah	629.798,6	660.217,9	4,83
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.550.514,2	1.649.166,8	6,36
Perubahan Inventori	401,2	402,5	0,32
Ekspor	1.298.232,6	1.380.143,0	6,31
Impor	2.091.617,8	2.197.662,8	5,07
PDRB	4.460.444,9	4.719.232,4	5,80

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2019

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak lepas dari kontribusi seluruh komponen yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Akhir Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Neto atau Ekspor minus Impor barang dan jasa.



Gambar 4.17 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto menurut Pengeluaran Tahun 2018

Selama tahun 2018, PDRB Kota Mojokerto sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga yaitu sebesar 68,91 persen. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal juga memiliki kontribusi yang relatif besar yakni sekitar 36,09 persen. Di sisi lain, impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar yakni 55,13 persen. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa sebagian kebutuhan domestik harus dipenuhi oleh produk dari luar wilayah Mojokerto (impor).



BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga Kota Mojokerto

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka porsi pengeluaran akan berubah dari pengeluaran makanan ke pengeluaran non makanan. Porsi pengeluaran masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi terhadap kebutuhan non makanan seperti: perumahan, barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan lama (kendaraan, perhiasan dan sebagainya) biasanya lebih besar dibanding masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Pergeseran pola pengeluaran dari makanan ke non makanan terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya permintaan terhadap barang non makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini terlihat jelas pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanan sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang non makanan, ditabung, ataupun investasi. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat, dimana distribusinya tersebut merupakan distribusi pendapatan masyarakat yang dapat dijadikan petunjuk tingkat pemerataan pendapatan masyarakat.

Dalam Tabel 5.1 menggambarkan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Kota Mojokerto dari tahun 2015 - 2018. Dimana terlihat rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan pada tahun 2018 hanya 2,5 persen.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Mojokerto Menurut Kelompok Pengeluaran (rupiah) tahun 2015-2018

Tahun	Rata-rata Pengeluaran per Kapita				
	Total	Makanan		Non Makanan	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2015	1.090.675	432.522	39,66	658.153	60,34
2016	1.168.781	487.221	41,69	681.559	58,31
2017	1.271.450	561.386	44,15	710.063	55,85
2018	1.240.028	559.204	45,10	680.824	54,90

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur 2015-2018

Jika dilihat berdasarkan pola konsumsi makanan dan non makanan, maka dari tahun 2015 sampai 2018 proporsi konsumsi untuk makanan mengalami peningkatan sedangkan proporsi konsumsi non makanan mengalami penurunan. Namun demikian proporsi untuk konsumsi non makanan masih lebih besar jika dibandingkan dengan konsumsi makanan.

Tabel 5.2. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Mojokerto Menurut Kelompok Makanan (rupiah) tahun 2015-2018

No	Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan			
		2015	2016	2017	2018
1	Padi-padian	57.260	50.682	51.879	54.418
2	Umbi-umbian	3.957	3.710	3.613	3.103
3	Ikan	26.782	29.891	34.026	31.694
4	Daging	26.558	27.411	34.058	28.354
5	Telur dan susu	45.681	42.055	40.543	37.566
6	Sayur-sayuran	23.840	31.597	40.233	31.889
7	Kacang-kacangan	19.330	18.354	15.457	17.984
8	Buah-buahan	29.429	23.141	29.261	36.311
9	Minyak dan Lemak	13.348	11.054	11.688	11.850
10	Bahan Minuman	14.119	13.711	15.124	14.204
11	Bumbu-bumbuan	7.714	9.000	8.809	9.651
12	Konsumsi lainnya	7.541	7.104	8.088	8.160
13	Makanan dan minuman jadi	123.469	170.872	225.459	222.127
14	Tembakau dan sirih	33.496	48.640	43.147	51.893
Jumlah		432.522	487.221	561.386	559.204

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur 2015-2018

Pada tabel 5.2 dan 5.3 digambarkan pola pengeluaran masyarakat Kota Mojokerto terhadap makanan dan non makanan. Dalam tabel tersebut persentase pengeluaran rumah tangga dibagi menurut jenis pengeluaran makanan dan jenis pengeluaran non makanan. Pada pengeluaran makanan dirinci menurut jenis komoditi makanan. Sedangkan pengeluaran non makanan dirinci menurut kelompok non makanan yaitu: perumahan, aneka barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama, pengeluaran untuk pajak dan asuransi, dan pengeluaran lainnya (untuk pesta dan lain sebagainya).

Tabel 5.3. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Kota Mojokerto Menurut Kelompok Non Makanan (rupiah) tahun 2015-2018

No	Kelompok non makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan			
		2015	2016	2017	2018
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	282.168	288.447	283.667	310.002
2	Aneka barang dan jasa	172.238	192.730	178.694	159.341
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	27.311	29.803	33.968	30.700
4	Barang tahan lama	117.812	96.829	135.844	98.576
5	Pajak dan asuransi	37.312	40.467	45.891	58.056
6	Keperluan pesta dan upacara	21.311	33.283	31.999	24.149
Jumlah		658.153	681.559	710.063	680.824

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur 2015-2018

Berdasarkan pada tabel tersebut terlihat bahwa proporsi pengeluaran rumahtangga rata-rata perbulan yang di keluarkan oleh rumahtangga di Kota Mojokerto tahun 2018 rata-rata sebagian besar adalah pengeluaran rumah tangga untuk non makanan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumahtangga di Kota Mojokerto sudah lebih untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga merupakan indikator bahwa penduduk Kota Mojokerto lebih sejahtera apabila di ukur dari kelompok pengeluarannya. Apabila dilihat menurut komoditi Makanan, pengeluaran terbesar penduduk Kota Mojokerto adalah untuk pengeluaran padi-padian,

makanan Jadi dan tembakau/sirih. Sedangkan pengeluaran terkecil adalah umbi-umbian. Dilihat dari pengeluaran non makanan, pengeluaran terbesar penduduk Kota Mojokerto adalah untuk pengeluaran perumahan dan aneka barang/jasa. Sedangkan pengeluaran terkecil adalah pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara.

5.2. Indeks Gini Kota Mojokerto

Indeks Gini Kota Mojokerto selama 4 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi. Dimana dari tahun 2015 sebesar 0.36, tahun 2016 sebesar 0.37, tahun 2017 sebesar 0.35, dan tahun 2018 sebesar 0.36. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Mojokerto selama 4 tahun terakhir dalam kategori ketimpangan sedang. Dengan kata lain distribusi pendapatan cukup merata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4. Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2015-2018

TAHUN	KOTA MOJOKERTO
2015	0,36
2016	0,37
2017	0,35
2018	0,36

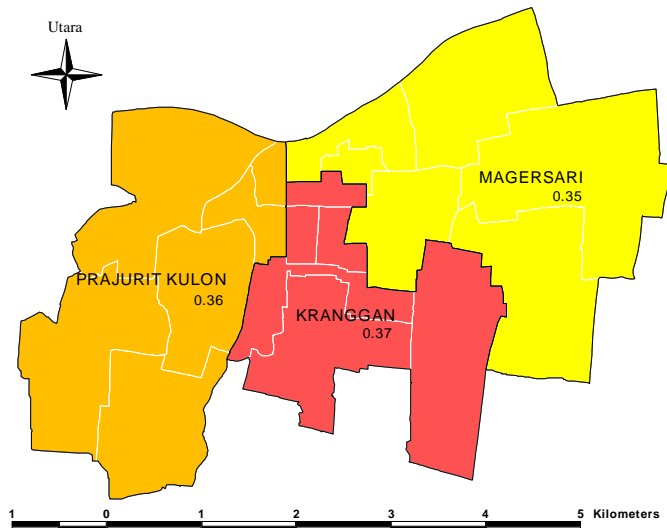
Sumber: BPS Kota Mojokerto dan Hasil Pengolahan

Pada tabel 5.5 disajikan Indeks Gini Kota Mojokerto menurut kecamatan. Jika dibandingkan antar kecamatan maka urutan nilai indeks gini dari yang terkecil menuju yang terbesar yaitu Magersari, Prajurit Kulon dan Kranggan.

Tabel 5.5. Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2018 menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Indeks Gini
1	PRAJURIT KULON	0,36
2	MAGERSARI	0,35
3	KRANGGAN	0,37
KOTA MOJOKERTO		0,36

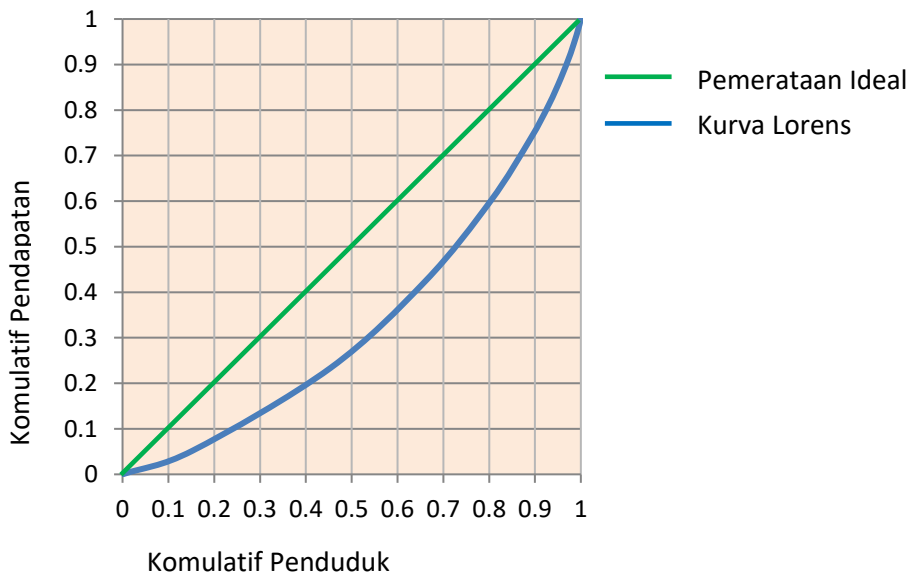
Sumber: Hasil Pengolahan



Gambar 5.1. Peta Indeks Gini Kota Mojokerto Tahun 2018

Berdasarkan hasil pengolahan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa ketimpangan Kota Mojokerto dan kecamatan-kecamatan di Kota Mojokerto masih di kategorikan sebagai ketimpangan moderat yang berarti ketimpangan pemerataan di Kota Mojokerto adalah sedang.

5.3. Kurva Lorens Kota Mojokerto



Gambar 5.2. Kurva Lorens Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Mojokerto 2018

Kurva tersebut digunakan untuk menunjukkan hubungan distribusi pendapatan dengan pemerataan pendapatan. Dimana semakin dekat kurva Lorens dengan garis diagonal, maka distribusi pendapatan semakin merata. Untuk Kurva Lorens Kota Mojokerto semakin mendekati garis diagonal hal ini menunjukkan bahwa distribusi pemerataan pendapatan semakin baik. Oleh Karena ada beberapa program yang di lakukan baik oleh Pemerintah Pusat dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan yaitu antara lain PNM mandiri Perkotaan (Kotaku), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Demikian juga Program yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Mojokerto antara lain JAMKESDA, BOSDA dan lain-lainya.

5.4. Ketimpangan Pendapatan Versi Bank Dunia

Identifikasi Indeks Gini yang didasarkan pada angka gini rasio baru menggambarkan tingkat pemerataan secara global. Efeknya, porsi pendapatan yang diterima penduduk belum tampak jelas. Untuk mengakomodir kelemahan tersebut, Bank Dunia memperkenalkan ukuran ketimpangan relatif. Inti ketimpangan relatif adalah visualisasi ketimpangan pendapatan yang diterima oleh beberapa kelompok penduduk. Ukuran yang digunakan berupa persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah.

Tabel 5.6. Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2015-2018 Menurut Kelompok Penduduk

Kelompok Pendapatan	2015	2016	2017	2018
40% Pendapatan Terendah	22,22	19,50	17,42	20,07
40% Pendapatan Menengah	38,73	41,17	34,45	37,64
20% Pendapatan Tertinggi	39,05	39,33	48,13	42,28

Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur 2015-2018 dan Hasil Pengolahan

Dalam kurun 2015 sampai dengan 2018, 40 persen penduduk berpendapatan rendah, rata-rata menerima 19,8 persen pendapatan. Itu artinya, secara umum-menurut Bank Dunia- ketimpangan pendapatan di Kota Mojokerto tergolong rendah. Kendati demikian, pemerintah daerah seperti halnya harus semakin memacu kinerjanya guna meningkatkan pemerataan.

Jika memperhatikan Tabel 5.6, kontribusi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah sejatinya hanya berada di sekitar angka 17-22 persen. Artinya kondisi ini masih sangat rentan. Guncangan ekonomi bisa saja mendorong kelompok pendapatan terendah untuk masuk ke dalam kondisi ketimpangan menengah/sedang.

Hal lain yang juga patut dicermati adalah dominasi kontribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 20 persen berpenghasilan teratas. Masih dari tabel yang sama, terlihat bahwa persentase pendapatan kelompok tertinggi rata-rata sebesar lebih dari dua kali lipat pendapatan kelompok terendah, bahkan di tahun 2017 besarnya bertambah. Dengan demikian, walaupun tergolong ketimpangan rendah (versi Bank Dunia), pada dasarnya porsi pendapatan yang diterima antar kelompok di Kota Mojokerto berbeda cukup signifikan, yang sekaligus kembali menegaskan hasil pembangunan belum dinikmati secara merata.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Mojokerto pada tahun 2018 yang sebesar 5,8 persen menunjukkan hal yang positif dalam kondisi ekonomi Indonesia yang agak stagnan, angka tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,65 persen, sehingga pada tahun 2018 Kota Mojokerto mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi.
2. Indeks Gini ratio Kota Mojokerto tahun 2018 berada di angka 0,36 hal ini menunjukkan bahwa bahwa Kota Mojokerto memiliki tingkat ketimpangan angka relative sedang (moderat). Demikian juga Indeks Gini untuk setiap kecamatan di Kota Mojokerto yang berada di antara 0,35 sampai dengan 0,37. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Mojokerto harus lebih berhati-hati dan mengantisipasi agar angka indeks gini di tahun mendatang mengalami penurunan. Sehingga angka kesenjangan relatif rendah dan tidak terjadi masalah-masalah sosial di antara golongan anggota masyarakat.
3. Berdasarkan ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia, dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2018, secara umum ketimpangan Kota Mojokerto tergolong rendah. Namun demikian kontribusi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah sejatinya hanya berada di sekitar angka 17-22 persen. Artinya kondisi ini masih sangat rentan untuk masuk ke dalam kondisi ketimpangan menengah/sedang. Oleh karenanya, pemerintah Kota Mojokerto harus semakin memacu kinerjanya guna meningkatkan pemerataan.

6.2. Saran

1. Pemerintah Kota Mojokerto perlu mengoptimalkan adanya harga-harga komoditas bahan makan dan non makanan yang cukup stabil, sehingga di harapkan dapat menyebabkan perubahan tingkat pendapatan nominal masyarakat dapat sesuai dengan perubahan daya beli terhadap komoditas bahan makanan dan non makanan di Kota Mojokerto.
2. Perlu adanya perbaikan pemerataan distribusi pendapatan yang dapat di lakukan melalui adanya program pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran, sehingga pengeluaran belanja makanan dan non makanan penduduk dapat lebih merata.
3. Perlu terus didorong munculnya pusat pertumbuhan yang berorientasi pada karakteristik setempat. Dengan meningkatkan produktivitas sektor/ produk unggulan untuk masing-masing wilayah.
4. Program-program pengembangan kawasan ekonomi di Kota Mojokerto agar di upayakan berdasarkan pada aspirasi masyarakat serta bersifat produktif seperti pengembangan UKM/ UMKM industri sepatu maupun pengembangan usaha ekonomi lainya di kelurahan pinggiran seperti Gunung Gedangan Kecamatan Magersari maupun Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon agar lebih merata kawasan ekonomi serta dapat memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat terutama golongan masyarakat dengan ekonomi yang rendah.